BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Tingkat pengangguran yang tinggi tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja, tetapi juga menjadi indikator adanya tantangan struktural dalam perekonomian suatu negara. Di Indonesia, fenomena pengangguran telah menjadi isu yang kompleks, meskipun berbagai kebijakan dan program telah diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan ini (Agustina et al., 2023).

Persentase tingkat pengangguran terhadap tingkat tenaga kerja dapat dilihat melalui tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kesehatan ekonomi suatu negara, serta memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka mengidentifikasi banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap secara maksimal oleh pasar kerja, hal tersebut banyak terjadi pada generasi muda yang baru saja menyelesaikan pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi, dengan kata lain semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka maka semakin tinggi pula tingkat pengangguran (Badan Pusat Statistik, 2019).

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Tahun 2015-2023

No	34 Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (%)								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Aceh	12.70	11.92	10.68	9.71	8.57	8.70	9.45	9.06	8.77
2.	Sumatera Utara	9.75	9.41	9.21	8.39	8.27	8.17	9.18	8.55	8.19
3.	Sumatera Barat	9.44	8.36	8.59	8.51	8.07	8.69	9.93	9.31	8.87
4.	Riau	10.64	9.66	8.87	8.54	8.24	8.08	7.17	6.59	6.37
5.	Jambi	4.90	6.66	5.61	5.43	5.55	6.83	7.31	7.00	6.77
6.	Sumatera Selatan	8.07	6.10	6.00	6.22	6.29	6.66	7.66	7.06	6.59
7.	Bengkulu	5.67	5.49	4.68	4.31	4.04	5.12	5.55	5.19	4.92
8.	Lampung	6.01	6.85	6.60	6.34	5.97	6.60	6.89	6.57	6.30
9.	Kep. Bangka Belitung	6.50	7.47	6.35	5.40	5.11	5.98	7.56	6.57	6.17

	34 Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (%)								
No		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10.	Kep. Riau	12.15	12.88	10.02	11.32	10.77	11.15	15.08	12.14	11.01
11.	DKI Jakarta	11.98	8.83	8.93	9.06	8.77	10.63	12.76	11.59	10.84
12.	Jawa Barat	12.76	13.02	12.60	12.34	11.80	12.94	13.83	12.51	11.61
13.	Jawa Tengah	7.81	6.52	6.44	6.43	6.41	7.44	8.94	8.54	7.81
14.	DI Yogyakarta	6.11	4.17	4.35	4.69	4.48	5.67	6.56	5.76	5.43
15.	Jawa Timur	6.55	6.25	6.10	5.73	5.68	6.52	8.04	7.56	6.77
16.	Banten	13.36	12.41	12.39	11.96	11.61	13.31	13.50	12.58	11.73
17.	Bali	2.37	3.07	2.02	1.58	2.01	4.07	8.11	7.24	5.08
18.	Nusa Tenggara Barat	7.83	5.63	5.52	5.07	4.79	5.15	5.48	5.37	5.13
19.	Nusa Tenggara Timur	5.04	5.22	4.85	4.25	4.55	4.78	5.27	5.07	4.67
20.	Kalimantan Barat	7.36	6.70	6.40	6.18	6.24	7.38	8.64	7.42	7.05
21.	Kalimantan Tengah	5.41	6.08	5.25	5.10	5.23	5.62	6.52	6.33	5.89
22.	Kalimantan Selatan	7.29	6.36	5.92	5.90	5.50	6.04	6.81	6.57	6.11
23.	Kalimantan Timur	10.92	12.84	12.01	10.00	9.62	10.16	10.23	9.63	9.03
24.	Kalimantan Utara	8.63	6.54	7.94	7.26	8.09	8.20	6.96	6.79	6.11
25.	Sulawesi Utara	13.21	10.91	9.71	9.17	8.18	9.03	10.81	9.82	9.24
26.	Sulawesi Tengah	5.04	5.11	4.88	4.81	5.02	4.82	5.61	5.17	4.97
27.	Sulawesi Selatan	8.79	7.51	7.58	7.51	7.41	8.86	8.65	8.01	7.43
28.	Sulawesi Tenggara	6.40	5.14	4.79	4.37	4.64	5.39	6.18	5.54	5.24
29.	Gorontalo	5.39	5.26	5.79	5.23	5.13	5.43	4.92	4.54	4.60
30	Sulawesi Barat	3.49	4.39	4.59	3.84	2.78	4.05	4.85	4.28	4.18
31.	Maluku	11.69	10.51	12.42	10.55	9.96	10.50	10.20	9.88	9.24
32.	Maluku Utara	8.59	5.44	7.49	6.88	7.37	6.67	7.42	6.97	6.76
33.	Papua Barat	8.65	9.46	10.77	9.50	9.03	10.18	9.10	8.47	8.22
34.	Papua	5.72	4.65	5.77	4.25	4.98	5.56	5.44	5.02	4.83
35.	Indonesia	8.90	8.31	8.08	7.75	7.60	8.48	9.51	8.76	8.11

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, (Badan Pusat Statistik, 2023a)

Berdasarkan Tabel 1.1, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional mengalami fluktuasi selama periode 2015–2023. TPT menurun dari 8,90% pada 2015 menjadi 7,60% pada 2019, kemudian meningkat pada 2020–2021 akibat pandemi Covid-19, masing-masing mencapai 8,48% dan 9,51%. Meskipun mulai membaik pada 2022 (8,76%) dan menurun menjadi 8,11% pada 2023.

Meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional menunjukkan tren penurunan dalam jangka panjang, kenyataannya terdapat fluktuasi yang signifikan antarwaktu serta ketimpangan antarprovinsi. Peningkatan TPT yang

terjadi pada masa pandemi Covid-19 (2020–2021) menegaskan kerentanan pasar tenaga kerja Indonesia terhadap guncangan global. Beberapa provinsi seperti Banten, Jawa Barat, dan Kepulauan Riau masih mencatat angka TPT yang tinggi, bahkan sempat melampaui 13% selama masa pandemi, sementara provinsi lain seperti Sulawesi Barat atau Papua menunjukkan TPT yang relatif rendah dan stabil. Ketidaksinkronan ini menegaskan bahwa indikator pengangguran terbuka tetap relevan untuk diteliti, karena mampu mengungkapkan kerentanan struktural dan disparitas regional dalam pasar tenaga kerja Indonesia. Dengan kata lain, TPT bukan hanya sekadar mencerminkan angka rata-rata nasional, tetapi juga menunjukkan kompleksitas dinamika tenaga kerja antarwilayah yang tidak dapat disederhanakan oleh tren nasional semata (Sukirno, 2019; Mankiw, 2019).

Pemilihan periode penelitian tahun 2015–2023 didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data yang konsisten dan relevansi kontekstual. Sejak tahun 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) mulai menyajikan data ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi, investasi, pendidikan, serta upah minimum dengan format yang seragam antarprovinsi, sehingga memungkinkan analisis panel dilakukan secara lebih valid (BPS, 2023). Dari sisi dinamika ekonomi, periode ini mencerminkan tiga fase penting, yaitu masa pra-pandemi (2015–2019) dengan pertumbuhan ekonomi relatif stabil di kisaran 5 persen per tahun dan tren pengangguran terbuka yang menurun (World Bank, 2020), masa krisis akibat pandemi Covid-19 (2020–2021) yang menimbulkan kontraksi ekonomi pertama sejak krisis Asia tahun 1998 serta lonjakan tingkat pengangguran terbuka menjadi 9,51 persen (ILO, 2021), serta masa pemulihan (2022–2023) ketika perekonomian mulai bangkit namun masih menghadapi tantangan jobless recovery (OECD, 2023). Selain itu, periode ini juga menandai transformasi struktural pasar tenaga kerja Indonesia, seperti akselerasi ekonomi, meningkatnya ketimpangan distribusi investasi digitalisasi antarwilayah, serta kebijakan pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program vokasi dan kartu prakerja (BKPM, 2022; Kemenaker, 2021). Sementara itu, penggunaan rentang waktu yang lebih

panjang berisiko menghadirkan masalah ketidakseragaman data antarprovinsi dan perubahan struktural jangka panjang yang sulit diakomodasi oleh model dinamis. Oleh karena itu, periode 2015–2023 dipandang paling relevan, representatif, sekaligus strategis untuk menggambarkan dinamika pengangguran terbuka di Indonesia.

TPT dipilih sebagai variabel utama dalam penelitian ini karena menjadi indikator baku yang menggambarkan secara langsung kondisi ketidakmampuan pasar tenaga kerja dalam menyerap tenaga kerja yang siap bekerja, sehingga menjadi tolok ukur penting efisiensi perekonomian suatu wilayah (BPS, 2023). TPT memiliki implikasi sosial-ekonomi yang serius. Tingginya pengangguran terbuka dapat menimbulkan masalah seperti hilangnya potensi output ekonomi (output loss), menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya angka kemiskinan, serta memperlebar kesenjangan sosial (Todaro & Smith, 2020). Selain itu, pengangguran yang berkepanjangan juga berpotensi memicu instabilitas sosial-politik, meningkatkan kriminalitas, dan mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah (Szirmai, 2015). Penelitian ini juga menyoroti empat variabel independen utama yang secara teoritis dan empiris diyakini memengaruhi pengangguran, yaitu pertumbuhan ekonomi, upah minimum, investasi, dan pendidikan. Pemilihan variabel-variabel tersebut didasarkan pada peran strategisnya dalam kebijakan pembangunan nasional dan relevansinya dalam literatur ekonomi tenaga kerja (Bappenas, 2020).

Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama kinerja ekonomi suatu negara memiliki hubungan yang erat dengan tingkat pengangguran sebagaimana dijelaskan dalam Hukum Okun (Okun's Law) (Mankiw, 2019), yang menyatakan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, di mana peningkatan pertumbuhan ekonomi seharusnya berkorelasi dengan penurunan tingkat pengangguran. Meski demikian, fenomena "jobless growth" yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran yang signifikan (Leasiwal et al., 2022).

5

Faktor lain juga berpengaruh terhadap pengangguran yaitu upah minimum. Kebijakan penetapan upah minimum yang berbeda-beda di setiap provinsi dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam mempekerjakan tenaga kerja. Menurut teori ekonomi neoklasik, penetapan upah minimum yang terlalu tinggi dapat berpotensi meningkatkan pengangguran karena perusahaan cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menekan biaya produksi (Borjas, 2020). Namun, sebuah studi yang dilakukan oleh Krueger & Card (1993) menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum tidak selalu menyebabkan kenaikan pengangguran, bahkan dalam beberapa kasus justru dapat mengurangi pengangguran melalui peningkatan daya beli masyarakat.

Investasi, baik domestik maupun asing, juga memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran (Hawariyuni & Andrasari, 2022). Teori klasik investasi yang dikemukakan oleh Keynes menekankan bahwa investasi merupakan komponen penting dalam permintaan agregat yang dapat menciptakan efek pengganda (multiplier effect) dalam perekonomian (Jhingan, 2011). Melalui efek pengganda ini, peningkatan investasi dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran.

Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan adanya ketimpangan distribusi investasi di berbagai provinsi di Indonesia. Pada tahun 2022, sebesar 56,4% dari total investasi terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara provinsi-provinsi di luar Jawa hanya menerima 43,6% (Perdana et al., 2023). Distribusi investasi yang tidak merata ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam penciptaan lapangan kerja dan pada akhirnya mempengaruhi tingkat pengangguran di masing-masing provinsi (Michie, 2018).

Salah satu faktor yang turut mempengaruhi tingkat pengangguran adalah pendidikan. Faktor pendidikan juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menentukan tingkat pengangguran. Teori human capital yang dikembangkan oleh Becker (1975) dan (Schultz, 1961) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi dalam sumber daya manusia yang dapat

6

meningkatkan produktivitas dan daya saing individu di pasar tenaga kerja. Menurut teori ini, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih baik (Dui, 2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), TPT untuk lulusan perguruan tinggi masih cukup tinggi, yakni sebesar 6,22%, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi tidak selalu menjamin kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan jika tidak disertai dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja (Zhou, 2023).

Kebaruan penelitian ini terletak pada dua hal utama. Pertama, dari sisi variabel, penelitian ini tidak hanya menelaah hubungan pengangguran dengan satu faktor saja, melainkan mengintegrasikan empat variabel penting pertumbuhan ekonomi, upah minimum, investasi, dan pendidikan dalam satu model analisis komprehensif. Penelitian terdahulu cenderung menganalisis faktor-faktor tersebut secara parsial atau terbatas pada wilayah tertentu, sehingga kontribusi penelitian ini adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai determinan pengangguran terbuka di seluruh provinsi Indonesia. Kedua, dari sisi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan panel ARDL (Autoregressive Distributed Lag) dengan estimator PMG (Pooled Mean Group) yang jarang diterapkan dalam studi pengangguran di Indonesia. Metode ini memungkinkan analisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang secara simultan serta mengakomodasi heterogenitas antarprovinsi.

Akhmad dan Marsuni (2019) dalam penelitiannya mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Sulawesi Selatan menemukan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Namun, Ariq Athira Syach (2024) dalam penelitiannya di Provinsi Bali justru menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak selalu bersifat linear dan dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural lainnya.

Nuzulaili (2022) juga menyatakan bahwa pengaruh upah minimum provinsi terhadap pengangguran di Pulau Jawa dan menemukan bahwa pengaruh upah

7

minimum terhadap pengangguran bervariasi antar provinsi, tergantung pada struktur ekonomi dan karakteristik pasar tenaga kerja di masing-masing provinsi. Hasil ini sejalan dengan temuan Ahmad Sahlan Hadi dan Riani (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas kebijakan upah minimum dalam mengurangi pengangguran sangat tergantung pada kondisi ekonomi makro dan tingkat elastisitas permintaan tenaga kerja di setiap wilayah.

Penelitian oleh Sulistiawati (2012) menyimpulkan bahwa investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran, terutama di sektor-sektor padat karya. Hal ini diperkuat oleh studi yang dilakukan Widya Putra et al. (2022) yang menunjukkan bahwa peningkatan investasi langsung, baik asing maupun domestik, berkorelasi positif dengan penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia.

Pembahasan mengenai hubungan antara pendidikan dan pengangguran, Alda Maylapattra (2023) menemukan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan yang kompleks dengan pengangguran, di mana pendidikan yang lebih tinggi tidak selalu menjamin tingkat pengangguran yang lebih rendah jika tidak disertai dengan keselarasan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Lebih lanjut, ALÇIN et al. (2021) menyoroti pentingnya reformasi sistem pendidikan yang berorientasi pada keterampilan yang dibutuhkan industri untuk mengurangi fenomena *skill mismatch* yang berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi.

Kesenjangan (gap) dalam penelitian terdahulu tersebut menunjukkan perlunya dilakukan penelitian komprehensif yang mengintegrasikan berbagai faktor yang mempengaruhi pengangguran di seluruh provinsi di Indonesia dengan menggunakan data terkini. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat karakteristik provinsi-provinsi di Indonesia yang sangat beragam, baik dari segi struktur ekonomi, demografi, maupun kondisi geografis, yang dapat menyebabkan perbedaan dalam dinamika pengangguran di masingmasing provinsi.

Urgensi penelitian ini semakin kuat jika dikaitkan dengan dampak pengangguran yang bersifat multidimensional. Secara ekonomi, pengangguran yang tinggi menyebabkan hilangnya potensi output ekonomi, menurunkan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Todaro & Smith, 2020). Secara sosial, pengangguran yang persisten dapat meningkatkan angka kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan bahkan berpotensi memicu masalah-masalah sosial seperti kriminalitas dan ketidakstabilan politik (Sukirno, 2019).

Berdasarkan hasil analisis yang didukung data sekunder melalui BPS dan adanya research gap, maka penelitian yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka: Studi Kasus Provinsi-Provinsi di Indonesia Periode 2015-2023" menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pengangguran di Indonesia dan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan pengangguran di berbagai provinsi di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

- Bagaimana gambaran umum tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, investasi, dan pendidikan di Indonesia periode 2015-2023?
- 2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran tebuka di Indonesia periode 2015-2023?
- 3. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode 2015-2023?
- 4. Bagaimana pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode 2015-2023?
- Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode 2015-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji relevansi Hukum Okun, Teori Ekonomi Neoklasik, Teori Investasi Klasik-Keynesian, dan Teori Human Capital dalam menjelaskan dinamika pengangguran di Indonesia. Keempat teori tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, investasi, dan pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka selama periode 2015 hingga 2023. Tujuan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

- Mendeskripsikan perkembangan tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, investasi, dan pendidikan di Indonesia periode 2015-2023.
- 2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di indonesia periode 2015-2023 .
- 3. Menganalisis pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia periode 2015-2023.
- 4. Menganalisis pengaruh investasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia 2015-2023.
- 5. Menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia 2015-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai dinamika pasar tenaga kerja dan membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang terintegrasi dalam upaya mengurangi pengangguran, tidak hanya dengan menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga dengan memperbaiki kualitas pendidikan, menarik investasi, serta menetapkan upah minimum yang berkeadilan dan adaptif terhadap kondisi ekonomi.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan dan rekomendasi dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang efektif melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengelolaan upah minimum yang proporsional, serta optimalisasi investasi dan pendidikan.

2. Bagi Dunia Usaha

Memberikan gambaran mengenai pentingnya sinergi antara kebijakan upah, investasi dan peningkatan kualitas tenaga kerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan.

3. Bagi Lembaga Pendidikan

Menjadi bahan evaluasi dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja guna mengurangi mismatch kompetensi dan meningkatkan kesiapan lulusan dalam menghadapi dunia kerja.

4. Bagi Peneliti

Menjadi referensi dan dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji permasalah pengangguran dan faktor-faktor ekonomi yang memengaruhinya dengan cakupan yang lebih luas atau pendekatan yang berbeda.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Gambaran mengenai isi skripsi secara keseluruhan dapat dijelaskan melalui sistematika berikut:

1. BAB I : Pendahuluan

Bab pertama berisi komponen awal skripsi yang memuat penjelasan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian secara keseluruhan.

2. BAB II : Kajian Pustaka, Kerangka Teoritis, dan Hipotesis

Bab kedua berisi konsep dasar dan teori utama yang digunakan,studi-studi empiris sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, diagram atau akur pemikiran penelitian, dan pernyataan dugaan hasil penelitian.

3. BAB III : Metode Penelitian

Bab ketiga berisi metode yang digunakan dalam penelitian dimulai dari deskripsi mengenai objek atau subjek yang diteliti, jenis pendekatan yang dipakai (kuantitatif atau kualitatif), definisi operasional, teknik dan alat pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data penelitian.

4. BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab keempat berisi deskripsi hasil penelitian terkait subjek dan objek, analisis data dan pengujian hipotesis dan analisis temuan dan pembahasan.

5. BAB V : Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Bab kelima berisi kesimpulan hasil akhir dari penelitian untuk menjawab rumusan masalah, dampak penelitian terhadap teori dan praktik bidang terkait, dan saran yang diberikan untuk pihak tekait atau untuk penelitian lanjutan.